



Dampak Kebijakan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet Di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

Norensya Yohana Moloring

Welson Yappi Rompas

Jericho D. Pombengi

norenmoloring@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui apa dampak kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kecamatan Ratatotok. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok belum memadai karena keterbatasan infrastruktur jaringan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilokasi penelitian, dalam hal dampak kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di Kecamatan Ratatotok sudah memberikan dampak positif namun permasalahannya jaringan tersebut masih belum memadai karena sebagian infrastruktur jaringan yang bisa dikatakan tidak berfungsi da masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan, Pengembangan Jaringan

ABSTRACT

This research is to find out what the impact of internet-based telecommunications network development policies is in Ratatotok District. In this research, researchers used a descriptive qualitative research approach. This research data was collected by conducting observations, interviews and documentation. Data was analyzed by means of data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The results of the research show that the impact of the policy on developing an internet-based telecommunications network in the Ratatotok sub-district is inadequate due to limited network infrastructure based on the results of interviews and observations at the research location. provide a positive impact. adequate because some of the network infrastructure can be said to be non-functional and there is still no special attention from the government.

Keywords: Impact, Policy, Network Development

JAP No.2 Vol. X (2024)
Hal. 30-38
Publish. 23 Mei 2024





PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan telekomunikasi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bukan tanpa alasan, keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sejak tahun 2005, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus untuk pembangunan konektivitas telekomunikasi. Ketika itu, Proyek Palapa Ring digagas untuk menyatukan Indonesia melalui akses telekomunikasi. Upaya itu dipercepat melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Rencana Pita Lebar Tahun 2014-2019.

Pemerintah berupaya mengikis kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di seluruh pelosok Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembangan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2006).

Kesenjangan akses telekomunikasi dan internet yang terjadi di Indonesia membutuhkan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

Perbup No. 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintahan daerah dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika dalam hal ini pemerintah kecamatan Ratatotok mengatakan bahwa kinerja pemerintah kecamatan sering terganggu karena di akibatkan adanya gangguan jaringan telekomunikasi internet yang sering menjadi hambatan mereka dalam bekerja.

Salah satu dari sedikit kecamatan yang terletak di kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Ratatotok adalah kecamatan yang terdiri dari lima belas (lima belas) desa, yang sebagian besar terletak sekitar 100 meter dari pantai dan merupakan wilayah pesimis pantai. Dalam hal ini, jumlah pengguna internet saat ini, terutama di lingkungan kecamatan Ratatotok, terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Internet di kecamatan Ratatotok ini hanya ada tiga provider, termasuk Telkomsel.

Ketersediaan jaringan Telekomunikasi dan internet ini memang sangat penting sebab menunjang komunikasi serta berkontribusi merubah taraf hidup masyarakat, berdasarkan hasil observasi bahwa Kecamatan Ratatotok ini masih sering terjadi permasalahan dalam mengakses internet karena masih sering terjadi gangguan atau sering *blank spot*, hal ini terjadi karena ada salah infrastruktur atau BTS (*Base Transceiver Station*) yang di bangun di area dekat rumah sakit Ratatotok di katakana sudah tidak berfungsi lagi dan menurut salah satu warga yang tinggal di area bangunan BTS mengatakan bahwa infrastruktur tersebut sudah tidak teralu memadai dalam mengakses internet karena jaringan tersebut mengganggu alat-alat medis yang ada di rumah sakit. Sebagian besar Masyarakat yang ada di kecamatan Ratatotok mengakses internet menggunakan IndiHome (*WiFi*).



Berbagai permasalahan dalam pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok tentu membutuhkan berbagai upaya dalam penyelesaiannya dan menjadi tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika yakni melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Dampak Kebijakan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet di Kecamatan Ratatotok”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti Terdahulu

1. Turambi. dkk. (2023) dengan judul Dampak Kebijakan Pengembangan Pariwisata Bagi Masyarakat Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengembangan pariwisata yang ada di kecamatan Woloan Satu Utara, bahwa kebijakan pengembangan pariwisata memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, dimana melalui kebijakan tersebut masyarakat dapat meningkatkan perekonomian, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. masyarakat di sekitar kawasan wisata.
2. Hendrika. dkk. (2020) dengan judul Dampak Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Masyarakat di Desa Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengembangan usaha mikro terhadap permasalahan publik berdasarkan permodalan, pemasaran,

kemampuan sumber daya manusia, dan kendala teknologi. Dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terlibat, dampak kebijakan terhadap situasi dan kelompok di luar tujuan atau sasaran kebijakan, dampak kebijakan terhadap situasi saat ini dan masa depan, serta biaya langsung dan tidak langsung yang ditanggung masyarakat adalah disajikan. Program ini dipetakan dalam bentuk modal usaha yang sukses dan dampak suksesnya terhadap pengembangan masyarakat usaha mikro, namun masyarakat harus aktif mencari informasi mengenai program pengembangan usaha pemerintah yang ada dan yang sedang berjalan.

3. Sundari (2019) dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengingat pembangunan jaringan listrik bawah laut Pisan belum sepenuhnya terlaksana, maka kami memperkirakan dampak yang timbul dari pembangunan ini dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang timbul dari tiga aspek berikut: (1) Aspek Sosial Budaya harus mendukung pengembangan dan pengenalan budaya Pulau Pisang, meningkatkan mutu pendidikan, dan menimbulkan dampak negatif terutama perubahan budaya masyarakat. (2) Dari segi perekonomian diharapkan adanya perbaikan perekonomian. Hal ini akan meningkatkan pendapatan, meningkatkan popularitas pariwisata dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan Pulau Pisan. Dampak negatifnya adalah kekurangan listrik di daerah lain. (3) Dari segi lingkungan



hidup, apabila dikembangkan sesuai spesifikasi, tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem laut. Untuk itu, Anda perlu melakukan beberapa hal. Yaitu: 1. Kesadaran politik yang lebih dalam akan memperkuat masyarakat, 2. Menerapkan mekanisme perbaikan/pembangunan yang tepat untuk kembali ke Pulau Pisang.

Kebijakan

Menurut Lasswel (1986 : 181-182) Kebijakan adalah studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih untuk mengevaluasi informasi yang tersedia dan bergayutan untuk memecahkan masalah masalah tertentu ilmu seperti ini adalah memusatkan pada lima tugas intelektual di dalam memecahkan persoalan lima tugas intelektual tersebut antarlain penjelasan tujuan tujuan pergerakan dan kecenderungan-kecenderungan penganalisaan keadaan, proyeksi dari pengembangan masa depan, dan penelitian, evaluasi dan penelitian, evaluasi dan pemilihan alternatif.

George C. Edward III dalam Londa dan Dengo (2007:11-12) mengartikan kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”, kebijakan publik itu hanya berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah. Kebijakan Publik itu dapat dinyatakan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah maupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dampak Kebijakan

Secara ekonomi memiliki makna yang pengaruh suatu pelaksanaan terhadap kondisi perekonomian di suatu negara. Dampak merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan karena adanya aktivitas manusia

(Suratno, 2004: 24). Dampak dalam suatu proyek pembangunan di negara berkembang utamanya pada aspek sosial memiliki komponen-komponen sebagai indikator sosial ekonomi di antaranya:

1. Peningkatan *income* Masyarakat
2. Kesehatan Masyarakat
3. Pertumbuhan penduduk
4. Penyerapan tenaga kerja
5. Perkembangan struktur ekonomi yang ditandai dengan adanya aktivitas perekonomian akibat proyek yang dilakukan seperti warung, restoran, transportasi, toko, dan lain sebagainya.

Thomas R. Dye dalam Winarno (2016) memberikan pengertian dampak kebijakan (policy impact atau sering juga disebut policy consequences) adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.

Charles O. Jones dalam Islamy (2006) mengartikan dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan; misalnya apakah dengan dibangunnya banyak sekolah dasar telah memberikan akibat semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan dasar.

Konsep Jaringan Telekomunikasi Internet

Jaringan telekomunikasi memang mencakup serangkaian peralatan dan sistem yang penting untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Kegiatan ini merupakan bagian integral dalam masyarakat modern dan sering kali diatur oleh badan pemerintah untuk memastikan pengoperasian yang efisien dan adil. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi jaringan ini,



sebagaimana diatur dalam Undang-undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1999.

Jaringan telekomunikasi adalah segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya (umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau mengetik) pada saat itu juga (Iradath, 2010). Ada beberapa komponen dasar system informasi yang mencakup jaringan telekomunikasi menurut (Agus, 2009) yaitu:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Hardware
3. Sumber Daya Software
4. Sumber Daya Data
5. Sumber Daya Jaringan

Menurut Supriyanto (2008: 60) Internet adalah singkatan dari *Interconnection Networking*. Internet berasal dari kata Latin “inter” yang berarti “antara”. Dengan kata lain, Internet mengacu pada jaringan atau koneksi antara satu sama lain. Oleh karena itu, kesimpulan dari definisi Internet adalah bahwa Internet adalah koneksi antara berbagai jenis komputer dan jaringan di seluruh dunia dengan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda, dan koneksi tersebut menggunakan fungsi yang berbeda. Kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar, atau protokol, dalam komunikasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2017), pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi khusus dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung pada pengamatan terhadap manusia baik dalam konteksnya maupun dalam bahasa yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di

Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Camat di Kecamatan Ratatotok
- c. Masyarakat (3 orang)
- d. Petugas pelayanan di bidang administrasi RSUP Ratatotok (1 orang)
- e. Guru yang ada di Sekolah Kecamatan Ratatotok (2 orang)
- f. Karyawan Indomaret/Alfamart/Alfamidi di Kecamatan Ratatotok (1 orang).

Fokus Penelitian merupakan landasan teori yang digunakan dalam memperoleh serta mengarahkan penelitian ini. Peneliti menggunakan teori menurut (Anderson, 2000) Dampak kebijakan publik dapat berupa:

1. Dampak kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan
2. Dampak kebijakan pada situasi atau orang-orang atau kelompok diluar sasaran
3. Dampak sekarang dan yang akan datang
4. Dampak kebijakan pada biaya langsung
5. Dampak kebijakan pada biaya tidak langsung

Hasil dan Pembahasan

Dampak Kebijakan yang Diharapkan dan Tidak di Harapkan

Dampak kebijakan ini merupakan sasaran yang di tunjukan kepada siapa kebijakan tersebut? Ini perlu di terapakan terlebih dahulu misalnya dalam mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik, maka sasaran yang dituju adalah pemerintah yang berada di Kecamatan Ratatotok dan dampak yang



diharapkan yaitu meningkatkan kinerja yang stabil dan aman.

Dalam hal ini sasaran kebijakan yang di berikan pemerintah daerah yaitu sistem kinerja yang berbasis elektronik sangatlah baik karena mempermudah seluruh akses dalam bekerja sehingga tidak butuh waktu yang lama lagi bagi pemerintah kecamatan dalam mendapatkan berbagai informasi dari pemerintah pusat maupun daerah serta ada beberapa kinerja yang sudah menggunakan aplikasi contohnya aplikasi dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang sekarang ini menggunakan aplikasi (Sikancil) untuk membantu pemerintah kecamatan serta masyarakat umum dalam proses pembuatan dokumen secara online. Namun terdapat dampak yang tidak diharapkan yaitu sistem jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok ini masih belum memadai akibat terbatasnya infrastruktur dalam pengembangan jaringan internet ini.

Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dengan mewawancarai beberapa informan dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak yang di harapkan dari pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok masih belum memadai dalam mendukung sistem kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dan belum ada upaya pemerintah terkait pengembangan ulang.

Dampak Kebijakan pada Situasi atau Orang-orang atau Kelompok Diluar Sasaran

Dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang atau kelompok sering disebut limbah kebijakan Dampak seperti ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat yang bukan sasaran dari suatu kebijakan yang di buat.

Dalam hal ini pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok ini sudah cukup bagus karena sudah membantu masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh, mendapatkan berbagai macam informasi dengan waktu yang cepat, serta membantu siswa dan guru dalam mengerjakan tugas sekolah dan juga membantu karyawan alfamidi dalam melakukan sistem transaksi topUp dengan mudah.

Hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dengan mewawancarai beberapa informan dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak pengembangan jaringan berdasarkan situasi atau orang atau kelompok memberi dampak positif.

Dampak Sekarang dan yang akan Datang

Dampak kebijakan ini sangat berpengaruh pada kondisi yang akan datang seperti dalam hal-nya jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok sekarang ini berdampak pada sisi Positif karena lebih mempermudah masyarakat umum dalam mendapatkan berbagai informasi. Namun selain berdampak pada sisi positif perkembangan jaringan di kecamatan Ratatotok saat ini juga masih ada masalah terkait pengembangan infrastruktur yang masih belum memadai. Hal ini harus di perhatikan oleh Dinas Kominfo agar supaya dapat memberikan kinerja yang baik terhadap pemerintah kecamatan dan juga pelayanan yang baik terhadap masyarakat sehingga bisa tercapai pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet yang maksimal.



Hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dengan mewawancarai beberapa informan dan melakukan observasi di lokasi penelitian. Jadi dapat di simpulkan bahwa dampak dampak saat ini berdampak pada sisi positif selain mempermudah pemerintah dalam sistem kinerja berbasis elektronik juga sangat mempermudah masyarakat umum dalam medapatkan berbagai informasi dengan cepat namun dampak sekarang ini masih dikatakan bahwa infrastruktur jaringan telekomunikasi masih belum ada pengembangan ulang dan hal tersebut merupakan tantangan dan tuntutan di masa yang akan datang.

Dampak Kebijakan pada Biaya Langsung

Dampak kebijakan pada biaya langsung ini menyangkut biaya-biaya langsung yang berdampak pada masyarakat pengguna internet. Menghitung biaya untuk setiap kebijakan/program ekonomi pemerintah (*economis costs*) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biayabiaya lain yang bersifat kualitatif (*social costs*). Menghitung biaya penggunaan internet lokalisasi PSK jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak sosial dari adanya lokalisasi tersebut.

Hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dengan mewawancarai beberapa informan dan melakukan observasi di lokasi penelitian bahwa biaya langsung yang dikeluarkan dalam pengembangan jaringan internet ini hanya berdampak pada biaya pembelian kuota dalam penggunaan internet.

Dampak Kebijakan pada Biaya Tidak Langsung

Dampak kebijakan juga menyangkut mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut, biaya-biaya seperti ini seringkali tidak

dipertimbangkan dalam suatu evaluasi-evaluasi kebijakan. Hal ini terjadi karena biaya tersebut bukan dihitung dengan nominal angka saja, hal ini seringkali sulit untuk dihitung karena sulitnya menentukan ukuran-ukuran yang akan dipakai. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung pada penelitian ini menyangkut masalah keluhan pemerintah kecamatan, masyarakat, dan para pengguna internet lainnya yang di terima oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada umumnya komponen yang ada di internal Dinas merasa sudah puas dengan kebijakan yang di keluarkan terkait sistem kinerja berbasis elektronik. Namun, ternyata masih ada juga tuntutan-tuntutan atau bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakpuasan dari masyarakat apalagi terkait dengan masalah pengembangan jaringan yang masih dikatakan belum memadai.

Hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dengan mewawancarai beberapa informan dan melakukan observasi di lokasi penelitian bahwa hal ini harus di tindak lanjuti oleh pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika supaya dapat memberikan pelayanan yang puas kepada pemerintah kecamatan dan masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini dan juga terkait pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di kecamatan Ratatotok ini bisa tercapai secara maksimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah di kemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat di simpulkan hasil penelitian sesuai dimensi-dimensi dampak kebijakan, yaitu sebagai berikut:

Dampak kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet di



kecamatan Ratatotok berdampak pada sisi positif untuk mengembangkan sistem kinerja pemerintah yang berbasis elektronik, karena dengan bantuan jaringan telekomunikasi berbasis internet lebih mempermudah pemerintah dalam melaksanakan kinerja yang lebih baik dalam sistem digitalisasi. Namun masalah pada keterbatasan jaringan internet di Kecamatan Ratatotok ini masih belum di atasi secara optimal karena keterbatasan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kebijakan yang di berikan belum sepenuhnya di lakukan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa karena sering mengalami masalah dalam jaringan telekomunikasi berbasis internet yang masih belum memadai.

Kebijakan yang pemerintah jalankan terkait dengan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet guna mendukung kinerja pemerintah berbasis elektronik juga berdampak pada kepuasan masyarakat, kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang menyebabkan sistem digitalisasi yang semakin luas yang berdampak pada pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet kedepannya.

Kebijakan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet ini sudah ada dan dijalankan sesuai tujuan kebijakan pengembangan jaringan internet dalam mendukung sistem kinerja pemerintah yang berbasis elektronik, namun dalam pengembangan jaringan telekomunikasi internet membutuhkan bantuan pembangunan ulang infrastruktur yang saat ini masih sulit di akses oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat umum.

Biaya langsung ini yang di tanggung oleh masyarakat maupun pemerintah pengguna jaringan telekomunikasi berbasis internet. Adapun para pengguna internet sering merasa

rugi karena biaya internet yang dibilang cukup mahal namun sering habis percuma karena sistem jaringan sering terjadi gangguan disaat para pengguna internet sudah terlanjur membeli kuota internet namun kuota tersebut habis percuma.

Biaya tidak langsung yang di tanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Adanya ketidakpuasan dari masyarakat akibat pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet yang masih belum memadai, hal ini di akibatkan karena keterbatasan infrastruktur jaringan yang diterima dan belum ada pengembangan ulang terkait jaringan telekomunikasi berbasis internet yang ada di Kecamatan Ratatotok.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dilanjutkan dengan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian khusus dari Dinas Komunikasi dan Informatika terkait adanya kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah agar sistem kinerja yang berbasis elektronik tersebut bisa di jalankan oleh pelaku kebijakan secara maksimal.
2. Tingkatkan peranan pemerintah mengenai pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet ini guna mendukung kebijakan atau program yang sedang di jalankan agar pemberian jaringan internet ini dapat di berikan secara merata diseluruh kecamatan Ratatotok.
3. Perlu adanya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi mengenai kegiatan atau program yang ada dan sedang di jalankan oleh pemerintah dan juga perlu



adanya pengembangan ulang terkait infrastruktur jaringan.

4. Perlu adanya pengembangan jaringan yang memadai agar masyarakat tidak rugi dengan biaya-biaya yang di keluarkan dalam pembelian kuota internet.
5. Perlu adanya survey ulang pada kebutuhan jaringan internet serta merealisasikannya dalam bentuk kegiatan atau evaluasi kebijakan mengenai sistem kinerja yang berbasis elektronik dan yang di perlukan adalah pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis internet yang memadai.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hendrika P. M. D, Florence D. L, Very L. (2020). *Dampak Kebijakan Pengembangan Usaha Masyarakat Mikro Di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung*. Manado; Jurnal Administrasi Publik: Universitas Sam Ratulung.
- Indrajit, R. E. 2006, *Electronic Government, Konsep pelayanan publik Berbasis Internet dan teknologi Informasi*, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer s(STIMIK)PERBANAS, Jakarta.
- Iradath. (2010). *Sistem Komunikasi II*. Erlangga: Jakarta
- Islamy, M. I. (2017). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Londa, V. Y., Dengo, S. (2017). *Public Policy*. Manado: “Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Unsrat”.
- Moleong, J. L. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sundari, Irma Ayu. (2019). "Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik Bawah Laut" (Studi Di Kabupaten Pesisir Barat)."
- Supriyanto. (2008). *Teknik Informasi & Komunikasi SMP Kelas VII*. Yudhistira: Yogyakarta.